

**ANALISIS KETERLIBATAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM
REVITALISASI PASAR SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2016**

(Skripsi)

Oleh

BJ Sedy Pratama



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**AN ANALYSIS OF STAKEHOLDERS INVOLVEMENT IN
REVITALIZATION PROGRAM OF SUKOHARJO
MARKET OF PRINGSEWU REGENCY IN 2016**

**By
BJ Sedy Pratama**

The leadership of President Joko Widodo has brought up several visions and missions upon 3 main problems of the nation which one of them is the weak condition of national economy. In order to overcome this problem, the government has created a priority program called Nawa Cita or 9 policy agendas, one of which leads to increase people's productivity and competitiveness in international markets. In harmony with the objectives of the central government, the local stakeholders involved in the program must comprehend the reference regarding the traditional market revitalization program that has been issued by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, to implement the program properly.

This research was conducted in Sukoharjo Market of Pringsewu Regency. The purpose of this study was to describe the stakeholders involvement in the revitalization program of Sukoharjo Market of Pringsewu regency in 2016 and also to find out and determine the communication pattern or the coordination among the stakeholders of the program. The method used in this study was a qualitative approach. The data collection techniques were done through observation, interview and documentation.

The results and discussions showed that the Diskoperindag of Pringsewu, Cleaning and Landscaping Agency of Pringsewu, Pringsewu Parliament, community and traders of Sukoharjo Market are all the stakeholders which played a role in the Sukoharjo Market Revitalization Program of Pringsewu Regency in 2016. The form of coordination among the stakeholders showed that the Diskoperindag of Pringsewu and Cleaning and Landscaping Agency of Pringsewu have appealed the communities and traders to occupy the relocations provided, but the community and traders requested the delay of the program yet it was not accommodated properly. It is suggested that the socialization process to the communities and traders should be more interactive and effective. Further, it is important to manage a more mature coordination to avoid misunderstandings among the communities and traders of Sukoharjo market.

Keywords: Stakeholders, Traditional Market Revitalization

**ANALISIS KETERLIBATAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM
REVITALISASI PASAR SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2016**

Oleh

BJ Sedy Pratama

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengusung sebuah visi dan misi terhadap 3 masalah pokok bangsa yang salah satunya, melemahnya sendi–sendi perekonomian nasional. Menghadapi problema mengenai hal tersebut, maka pemerintah membuat program prioritas yang disebut dengan Nawa Cita atau 9 agenda kebijakan yang salah satunya mengarah kepada peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Demi selarasnya dengan tujuan dari pemerintah pusat maka, *stakeholder* daerah yang terlibat dalam program haruslah mengetahui acuan program revitalisasi pasar tradisional yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, agar dapat mengimplementasikan program tersebut dengan baik.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan *stakeholder* yang terlibat dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016 serta mengetahui dengan jelas dan mampu mendeskripsikan komunikasi atau hubungan yang dilakukan antar *stakeholder* dalam program tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Diskoperindag Pringsewu, Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Pringsewu, DPRD Pringsewu, masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo Pringsewu merupakan *stakeholder* yang terlibat, serta memiliki ranah serta peran dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016. Serta, bentuk koordinasi antar *stakeholder* tersebut yaitu Diskoperindag Pringsewu dan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Pringsewu menghimbau masyarakat dan pedagang menempati relokasi yang disediakan, namun masyarakat dan pedagang meminta penundaan program dan permintaan tersebut tidak diakomidir. Saran peneliti ialah, sebaiknya dalam proses sosialisasi bisa lebih interaktif dengan waktu yang efektif kepada masyarakat dan pedagang. Kemudian, perlunya koordinasi yang lebih matang agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo.

Kata kunci: *Stakeholder*, Revitalisasi Pasar Tradisional

**ANALISIS KETERLIBATAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM
REVITALISASI PASAR SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2016**

Oleh

BJ Sedy Pratama

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

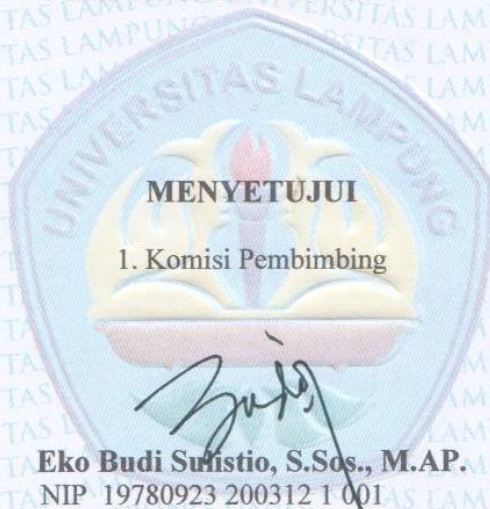
Judul Skripsi : **ANALISIS KETERLIBATAN STAKEHOLDER
DALAM PROGRAM REVITALISASI PASAR
SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : **BJ Sedy Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : 1346041004

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

NIP 19780923 200312 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

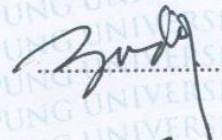
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.

NIP 19750720 200312 1 002

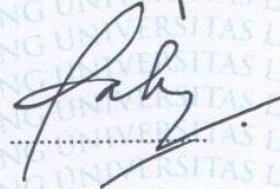
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP.

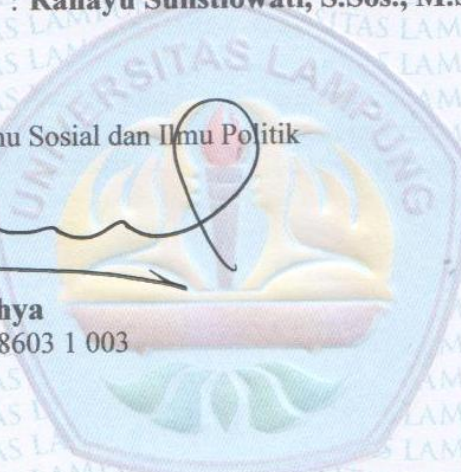


Penguji Utama : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 April 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 28 April 2017

Saya membuat pernyataan,



BJ Sedy Pratama

NPM. 1346041004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap BJ Sedy Pratama, penulis dilahirkan di Lanu Astra Ksetra, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 21 Agustus 1994. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Syahbana dan Ibu Junaidah.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius Gunung Batin yang diselesaikan pada tahun 2001, lalu lanjut ke Sekolah Dasar (SD) Xaverius Gunung Batin lulus pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Gunung Batin lulus pada tahun 2010, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terusan Nunyai yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Paralel.

Selama perkuliahan penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Tahun 2014 menjadi staf ahli Kementrian Dalam Negeri BEM U KBM Unila periode 2014/2015. Pernah menjabat sebagai Ketua Pelaksana Seminar Nasional National Leadership Development Program (NLDP) pada tahun 2014. Kemudian, tahun 2015 menjadi Kepala Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) Himagara FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2016 penulis mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Fa inna ma'al usri yusra.

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS Al-Insyirah [94]: 5)

"Kesalahan kemarin adalah kebijakan esok"

(Merry Browne)

"Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang terkhusus untuk publik, bukan diperuntukkan suatu golongan tetapi lebih identik memberikan solusi bagi permasalahan publik agar lebih baik"

(BJ Sedy Pratama)

"Disiplin kunci keberhasilan"

(BJ Sedy Pratama)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah Nya, kupersembahkan karya ini untuk:

Bapak Syahbana dan Ibu Junaidah

Selalu menjadi motivasi disetiap langkah dalam mengarungi kehidupanku
Selalu mendoakan dan *support* penuh segala aktivitasku hingga saat ini
Semoga seluruh peluh dan tetesan keringat yang keluar dalam perjuanganmu
senantiasa berkah dan dibalas dengan SURGA..

Segenap keluarga besar dan orang-orang terkasih yang selama ini
selalu mendukung dibalik layar tanpa terkecuali, Seluruh Dosen Ilmu
Administrasi Negara, Sahabat, Teman-Temanku, Kakak Tingkat dan
Adik Tingkat yang selalu mendukungku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Keterlibatan Stakeholder dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2017*". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Saya ucapkan terimakasih untuk Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing, yang selalu meluangkan waktu, masukan dan arahan dalam proses bimbingan skripsi sampai dengan selesai. Selama proses bimbingan penulis mendapatkan banyak pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi yang baik dan benar, nasehat-nasehat yang bermanfaat dan membangun untuk penulis agar lebih baik serta menanamkan sikap ilmiah

yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tidak terlepas dari sikap anda yang tegas dan konsisten dalam membimbing penulis untuk menjadi lebih baik sampai dengan selesai. Penulis merasa bangga telah dibimbing oleh anda dan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

2. Terimakasih untuk Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu bersedia memberikan keceriaan, kritik, saran dan masukannya yang membangun kepada penulis untuk lebih baik.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan masukan selama proses akademik.
4. Bu Nur sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan bagi penulis dan administrasi di jurusan.
5. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, Bu Meli, Bu Devi, Bu Selvi, Bu Dian, Bu Dewi, Bu Ita, Bu Novita, Bu Intan, Pak Syamsul, Pak Dedy, Pak Nana, Pak Simon, Pak Noverman, Pak Ferry, Pak Izzul dan Pak Yuli. Terimakasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis kedepannya

6. Terimakasih kepada Bapak M.Nurdin selaku Sekretaris Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, yang telah memberikan waktu serta informasinya kepada penulis selama penelitian.
7. Terimakasih kepada Bapak Sagang Nainggolan selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu, yang telah memberikan data serta informasinya kepada penulis demi kelancaran penelitian.
8. Terimakasih kepada Ibu Nurhayati selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu, yang telah memberikan informasi serta waktunya demi kelancaran proses penelitian ini.
9. Terimakasih kepada para pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Ibu Yuni, Ibu Siti Sholeha, Bapak Tarno dan Bapak Tomi, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi serta masukan kepada penulis demi kelancaran skripsi ini.
10. Terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu terutama Bapak Zainudin dan Bapak Karman yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi demi kelancaran skripsi ini.
11. Untuk sahabat-sahabat kecilku, Iqbal, Deny, Dian, Oktiyan, dan Rio. Terimakasih selama ini sudah menjadi sahabatku yang terus menyemangati dan memberikan perhatian kepadaku untuk tetap terus berjuang.
12. Untuk sahabat-sahabatku di SMA, Aziz, Andri, Guntur, Kevin, Bayu, Jumyadi, Chendi, Agung, Deno, Desy, Meri, Anggita,
13. Untuk sahabat-sahabatku di perkuliahan, Adi, Okta, Ghozie, Zulham, Ari, Iqbal, Hendro, Galih, Hendriko, Hasby, Dhimas, Leo, Sidik, Dinda, Arief, Zikri, Hafiz, Rezghi, Respaty, Fajar, Anggi dan Pindo. Berkat kalianlah

penulis mengerti arti sebuah loyalitas dan kebersamaan dalam menjalani hari-hari diperkuliahan dan diluar perkuliahan. Banyak kesan yang menyenangkan dan tidak terlupakan. Dari kalianlah penulis menjadi termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian Wiza, Uun, Uki, Ghina, Okke, Septiya, Sarah, Desti, Devi P, Destiyana dan Lela. Terimakasih atas masukan dan bantuannya yang pernah diberikan kepada penulis. Tetap semangat kalian wanita-wanita hebat.

14. Untuk sahabat-sahabat KKN yaitu Sawal, Faizun, Agam, Regina, Tasya dan Rika. Terimakasih banyak untuk kesan yang bermakna selama 60 hari KKN. Berkat kalianlah penulis bisa memahami dan mengerti pembelajaran pendewasaan.
15. Untuk sahabat-sahabatku Dagri, yang tercinta Kak Doko, Mba Andar, Dimmas, Rafi, Septi, Ria, Nandha, Chaterine dan Jeany. Terimakasih telah memberi kesan yang baik selama di organisasi BEM U KBM Unila 2014/2015 sampai dengan saat ini. Dari kalian penulis bisa mencontoh sisi baik untuk pribadi yang lebih baik.
16. Untuk sahabat-sahabat Demisioner Himagara periode 2016-2017, Sidik Aryono, Pindo Riski Saputra, Uun Nuraini, Arinta Fitriani Agnes, Uki Setiani, Zulham Effendi, Desti Eka Rahmawati, Dinda Saputra, Rindu Nova Daria Putri, Tiara Novita, Ghina Ulfaridha, Hendro Saputra, Okke Wijayanti, Septiya Andri Astuti, Zikrillah Fathoni dan Muhammad Leo Andika Candra. Terimakasih selama ini telah memberikan banyak pengalaman, cerita, canda tawa, serta kepeduliannya yang telah diberikan kepada penulis. Kalian lah orang-orang hebat dan mengerti akan sebuah keikhlasan dalam berorganisasi.

17. Terimakasih untuk abang dan mbak Himpunan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bang Hendi (09), Bang Desmon (010), Bang Ridho (010), Bang Bek (010), Bang Aden (010), Bang Loy (010), Bang Eko (012), Bang Sholeh (012), Bang Fajar (012), Bang Ageng (012), Mbak Novita (012), Mbak Anisa (012), Mbak Serli (012), dan Mbak Purnama (012).
18. Untuk teman-teman seperjuangan “Alas Menara” Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
19. Terimakasih untuk adik-adik tingkatku Ilmu Administrasi Negara, Tiyaz (014), Binter (014), Adi (014), Nuridin (014), Tengku (014), Herwan (014), Dinda (014), Nabila (014), Nikmah (014), Ara (014), Gusty (014), Astri (014), Suci (014), Nur'arifah (014), Dedi (015), Suryo (015), Nafi (015), Ferdinan (015), Rizki (015), Meika (015), Rani (015), Devi (015), Nurma (015), Muslimah (015), Angel (015), Galuh (015), dan Oca (015).
20. Teruntuk teman wanitaku yang telah menemani, membantu dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi sampai dengan selesai yaitu Arinta Fitriani Agnes. Penulis ucapkan terimakasih banyak.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun mereka yang telah menyediakan waktu membacanya.

Bandar Lampung, 28 April 2017

Penulis,

BJ Sedy Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Stakeholder</i> dalam Proses Kebijakan Publik	11
B. Komunikasi Kebijakan Publik	15
C. Pasar	16
D. Program Revitalisasi Pasar Tradisional	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	24
B. Fokus Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Instrumen Penelitian	26
E. Jenis dan Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Teknik Keabsahan Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
1. Keterlibatan <i>Stakeholder</i> Dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	42
a. <i>Stakeholder</i> yang terlibat dan alasan keterlibatan.....	43
b. Ranah keterlibatan <i>stakeholder</i>	67
c. Peranan <i>stakeholder</i> dalam menyukseskan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.....	82

2. Komunikasi atau Hubungan antar <i>Stakeholder</i> yang Terlibat dalam Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	96
a. Proses komunikasi antar <i>stakeholder</i> dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016	97
b. Bentuk koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016	111
B. Pembahasan	128
1. Keterlibatan <i>Stakeholder</i> Dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016	130
a. <i>Stakeholder</i> yang terlibat dan alasan keterlibatan.....	130
b. Ranah keterlibatan <i>stakeholder</i>	135
c. Peranan <i>stakeholder</i> dalam menyukseskan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016	140
2. Komunikasi atau Hubungan antar <i>Stakeholder</i> yang Terlibat dalam Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	144
a. Proses komunikasi antar <i>stakeholder</i> dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016	145
b. Bentuk koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016	151
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	158
B. Saran	161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Informan Penelitian.....	27
2. Dokumen Penelitian.....	28
3. Contoh Tabel Triangulasi Analisis Keterlibatan <i>Stakeholder</i> dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	33
4. Jumlah Pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Berdasarkan Klasifikasinya.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	31
2. Los Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang direvitalisasi tahun 2014	37
3. Los Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang direvitalisasi tahun 2016	38
4. Bentuk Kerjasama antara Diskoperindag Kabupaten Pringsewu dengan CV Super Power Engineering	38
5. Masyarakat Pasar Sukoharjo, Kepala Diskoperindag dan Komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu meninjau teknis pembangunan Pasar Sukoharjo....	65
6. Gambar Rencana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016	68
7. Daftar pedagang Pasar Sukoharjo yang mengeluhkan waktu pembongkaran los pasar kepada DPRD Kabupaten Pringsewu	102
8. <i>Stakeholder</i> yang Terlibat dan Alasan Keterlibatan	134
9. Ranah Keterlibatan <i>Stakeholder</i>	139
10. Peranan <i>Stakeholder</i>	144
11. Bentuk Komunikasi antar <i>Stakeholder</i>	150
12. Bentuk Koordinasi antar <i>Stakeholder</i>	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor ekonomi merupakan sektor sentral yang menunjang perubahan terhadap suatu negara, serta memberikan dampak kepada kehidupan bermasyarakat seperti: sosial, politik dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan perekonomian penting dilakukan agar kehidupan masyarakat kedepannya menjadi lebih baik. Karena suatu negara dapat dikatakan berhasil jika mampu mengelola SDM dan SDA negara dengan baik. Dengan begitu proses pertumbuhan perekonomian memberikan sebuah hal yang positif terhadap kemajuan masyarakat dan negara. Sesuai dengan pendapat Sanusi (dalam Posumah, 2015:4) yang menyatakan bahwa, pembangunan merupakan sebuah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat bersangkutan.

Kegiatan perekonomian di berbagai negara secara garis besar memiliki tujuan yaitu untuk menyejahterakan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pada era globalisasi saat ini, banyak negara-negara yang berusaha untuk menguasai sektor perekonomian dunia yaitu salah satunya dengan menguasai sektor pasar. Hal ini

membuat pemerintah Indonesia mulai memfokuskan kepada sektor pasar, meskipun pasar-pasar yang ada di Indonesia saat ini masih belum bisa bersaing dengan negara-negara lain baik secara kualitas ataupun kuantitas barang Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melakukan sebuah komitmen dalam pengelolaan pasar yang berbasis ekonomi kemasyarakatan kecil menengah. Hal ini dinilai tepat untuk mendongkrak pembangunan perekonomian yang ada di daerah-daerah. Bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara ini telah tertuang dalam sebuah agenda pokok kebijakan dalam pembangunan perekonomian yang disebut dengan Nawa Cita. Salah satu bentuk komitmen pemerintah tersebut diharapkan menjadi solusi untuk pembangunan perekonomian di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu 9 (sembilan) prioritas atau disebut dengan Nawa Cita. Salah satu isi Nawa Cita yang berkaitan untuk memajukan pertumbuhan perekonomian itu, mengenai peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Selain itu juga, adapun peraturan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan telah diwujudkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Serta, ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Hal ini membuktikan bahwa, Pemerintah Indonesia cukup serius dalam perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam meningkatkan

pertumbuhan perekonomian yang semakin baik untuk kedepannya. Dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang baik, pemerintah Indonesia terus memberikan perhatian yang lebih kepada sektor pasar.

Seperti yang diketahui secara umum, pasar merupakan tempat dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan sebuah transaksi tawar menawar berupa barang dan jasa. Menurut Dahl dan Hammond (dalam Widodo, 2013:30), menyatakan bahwa pasar adalah sebagai suatu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau memodifikasi harga, sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik dan institusional. Pasar juga merupakan sentral ekonomi yang cakupannya mikro sehingga mudah dalam pengelolaannya. Oleh karena hal itulah, kebijakan dalam pasar pun telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasar yang ada di Indonesia, dan disini, pasar yang dimaksudkan adalah pasar tradisional yang ada di tiap-tiap daerah.

Seperti yang diketahui, bahwa pasar tradisional merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern. Umumnya, pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Lokasi pasar tradisional berada ditempat yang terbuka atau bahkan di pinggir jalan. Adapun isu mengenai pasar tradisional yang kerap menyerpa seperti adanya pungutan liar, kondisi pasar yang tidak layak, tidak adanya perhatian

pemerintah setempat terhadap kesejahteraan warga pasar dan lain-lain. Menyebabkan pasar tradisional kehilangan perhatian dan makin tersingkirkan dikarenakan kondisi yang semakin modern. Dengan melihat fenomena tersebut akhirnya pemerintah mengambil sebuah tindakan terhadap pasar tradisional.

Kemudian pemerintah menyiapkan kebijakan yang bisa menangani permasalahan yang ada di pasar tradisional tersebut. Sebagaimana mestinya setiap kebijakan publik merupakan dasar tindakan pemerintah untuk memecahkan problem yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Sesuai dengan pendapat Islamy (dalam Sulistio, 2009:3), kebijakan publik didefinisikan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, demi kepentingan seluruh masyarakat. Begitu juga kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah mengenai revitalisasi pasar tradisional, kebijakan dalam revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dinilai merupakan solusi yang baik untuk memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia saat ini.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan inovasi kebijakan perekonomian yang salah satunya telah ditegaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan atas dasar untuk memperlancar distribusi arus barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri, perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang dan pusat distribusi. Serta, untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang dan pusat distribusi.

Kebijakan pemerintah tersebut adalah bentuk sebuah support dan pengaplikasian program dari revitalisasi pasar tradisional. Meskipun kebijakan tersebut sudah dirasa tepat, tetap saja dalam proses penyampaian kebijakan revitalisasi tersebut haruslah tersampaikan dengan baik. Karena pada fenomena yang ada, banyak sekali kebijakan pemerintah yang dalam realisasinya atau pengimplementasiannya dinilai tidak sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, dalam proses pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai program revitalisasi pasar tradisional haruslah dikomunikasikan dengan baik agar sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Pentingnya sebuah komunikasi kebijakan adalah tidak lain agar kebijakan publik tersebut tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan begitu masyarakat bersama dengan pemerintah saling menyukseskan kebijakan tersebut. Maka dari itu dalam proses kebijakan publik perlu adanya sebuah komunikasi kebijakan, yang dalam hal ini sangat penting untuk proses pengimplementasian kebijakan publik terutama mengenai program revitalisasi pasar tradisional. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari teori Borman (dalam Santosa, 2013:23-25), yang menyatakan komunikasi kebijakan adalah suatu perkataan atau istilah yang merupakan payung untuk semua perbincangan dan analisis yang dibuat secara berhati-hati, sistematis dan sadar, tentang komunikasi.

Di dalam komunikasi kebijakan ini agar sesuai dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan para pemangku kepentingan yang mengerti dan memahami dalam proses mengkomunikasikan sebuah kebijakan. Para pemangku kepentingan yang dimaksud adalah para *stakeholder* yang terlibat dalam revitalisasi pasar tradisional.

Sehingga dalam proses pelaksanaan mengenai kebijakan, *stakeholder* perlu memahami dan mengerti terlebih dahulu tentang arah dan tujuan dari sebuah kebijakan dari program revitalisasi pasar tradisional.

Hal ini sudah sepatutnya bagi *stakeholder* yang ada di tiap-tiap daerah yang terlibat dalam revitalisasi pasar tradisional, mengetahui pedoman yang telah tertuang dalam program pemerintahan pusat tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya *stakeholder* menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan pedoman tersebut.

Sehingga dalam pengimplementasian program dari pemerintah pusat tidak mengalami kendala, maka disinilah dibutuhkan keterlibatan *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang diharuskan profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya. Dapat mengutamakan kepentingan umum atau publik diatas kepentingan pribadi. *Stakeholder* ini juga diharapkan kedepannya dapat memberikan sebuah kontribusi yang baik dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional saat ini. Namun bukan hanya persoalan wewenang saja yang dimiliki *stakeholder* dalam sebuah pelaksanaan kebijakan publik, tetapi juga *stakeholder* memiliki pertanggungjawaban atas pengimplementasian sebuah program. Oleh karena itu, *stakeholder* diharuskan profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya.

Secara garis besar dari uraian tersebut, dapat menggambarkan bahwa pentingnya keterlibatan *stakeholder* adalah memudahkan dan menyukseskan pelaksanaan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat yang berlandaskan masyarakat. Begitupun

juga semestinya keterlibatan *stakeholder* yang ada dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi pasar tradisional adalah menyukseskan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan, *stakeholder* yang terlibat dalam program revitalisasi pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016 ini melibatkan sejumlah para pemangku kepentingan dari berbagai ranah yaitu, DPRD Kabupaten Pringsewu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pringsewu, Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu serta pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Stakeholder* tersebut telah memiliki perannya masing-masing dalam program revitalisasi pasar tradisional Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 ini, yaitu DPRD Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga pengawas jalannya program revitalisasi pasar tradisional, Diskoperindag Kabupaten Pringsewu yang memiliki tugas dalam *eksekutor* pembangunan pasar dari pengurusan bangunan pasar sampai pada proses peremajaan bangunan pasar, kemudian Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu yang kemudian melakukan pengelolaan pasar tradisional setelah peremajaan pembangunan Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu selesai, serta partisipasi pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dalam mendukung program revitalisasi pasar tradisional ini demi kenyamanan satu sama lain.

Tetapi pada faktanya terjadi permasalahan pada saat revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sedang berlangsung. Dimana permasalahan ini melibatkan

antar pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang ada di Kabupaten Pringsewu. Antara masyarakat Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pringsewu.

Konflik tersebut terjadi karena masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo yang meminta pembangunan Pasar Sukoharjo ditunda terlebih dahulu. Akan tetapi, pemerintah daerah tetap melakukan pembangunan pasar dan dinilai tidak mengakomodir keinginan masyarakat. Melihat hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu menyayangkan atas tindakan Diskoperindag Kabupaten Pringsewu tersebut, sehingga proses pembangunan Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pun sempat mengalami pemberhentian sementara dalam proses revitalisasinya. Karena seperti yang diketahui, bahwa Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu pasar tradisional yang masih berdiri di Kabupaten Pringsewu. Adapun profil mengenai Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang menyatakan bahwa, dari jumlah toko terdapat 27 unit, los para pedagang sebanyak 198 unit dan hamparan sejumlah 180 unit. Dari profil Pasar Sukoharjo tersebut, dinilai sangat berperan penting dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu. Dengan data tersebut, maka tidak heran pada pelaksanaan program revitalisasi Pasar Sukoharjo banyak pihak yang ikut terlibat dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo tahun 2016 tersebut. (*sumber: Dokumen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2016*)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo

yaitu “**Analisis Keterlibatan *Stakeholder* dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan permasalahan yang ingin dijelaskan melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah komunikasi atau hubungan antar *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan *stakeholder* yang terlibat dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.
2. Mengetahui dengan jelas dan mampu mendeskripsikan komunikasi atau hubungan yang dilakukan antar *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi administrasi negara khususnya kebijakan publik.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu seperti: DPRD, Pemerintah daerah, pedagang dan lain-lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Stakeholder* dalam Proses Kebijakan Publik

1. Pengertian *Stakeholder*

Para pemangku kepentingan di sebuah institusi manapun memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan institusi ataupun lembaga. Munawaroh (2016:32-33) menyebutkan bahwa para pemangku kepentingan itu lebih sering disebut dengan *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, *stake* dan *holder*. Secara umum, kata *stakeholder* dapat diterjemahkan dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan penjabaran diatas, secara garis besar konsep *stakeholder* sebagai individu atau organisasi baik profit maupun non profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, *stakeholder* semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.

Munawaroh (2016:32-33) mengatakan bahwa pendapat lain mengenai *stakeholder* adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif ataupun negatif. Selanjutnya

stakeholder juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *internal stakeholder* dan *eksternal stakeholder*. *Eksternal stakeholder* merupakan sekelompok individu yang bukan merupakan bagian dari anggota organisasi namun, mempengaruhi organisasi. Sedangkan *internal stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang tidak secara tegas menjadi bagian dari lingkungan organisasi karena sebenarnya *internal stakeholder* adalah anggota dari organisasi, dimana para manajer memiliki tanggung jawab atas kepentingan mereka.

Sedangkan menurut Freedman (dalam Saharuddin, 2013:233), *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Budimanta dkk (dalam Saharuddin, 2013:233) mengungkapkan bahwa, *stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program.

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat ahli mengenai *stakeholder* bahwa, *stakeholder* merupakan individu ataupun kelompok yang memiliki sebuah kepentingan yang ada disebuah perusahaan atau di dalam program yang dimana keterlibatan *stakeholder* tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan ataupun program. Dalam penelitian ini, analisis *stakeholder* diperlukan untuk mengetahui peran masing-masing *stakeholder* yang merupakan semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dari sebuah tindakan program khususnya dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Dewasa ini masalah – masalah mengenai publik sangat kompleks. Untuk mencari solusi atau penyelesaian dari permasalahan publik maka, dibutuhkan sebuah kebijakan publik. Menurut W.I. Jenkins (dalam Sulistio, 2009:3), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara–cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan–keputusan itu pada prinsipnya berada dalam batas–batas kekuasaan dari para aktor tersebut.

Adapun menurut Willy N. Dunn (dalam Syafiie, 1999:107), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Serta juga pendapat mengenai kebijakan publik menurut Singadilaga (dalam Anggara 2012:499) yang menyatakan, kebijakan publik adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Tidak jauh berbeda menurut Thomas R. Dye (dalam Sugandi, 2011:78) menyatakan kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.

Serta menurut Wilson (dalam Wahab, 2016:13) menyatakan bahwa, kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan

pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, kebijakan publik merupakan sebuah identitas dimana pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakannya yang menyangkut kebutuhan masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah yang tengah dihadapi haruslah berorientasi kepada penyelesaian dan demi kebaikan seluruh masyarakat khususnya.

3. *Stakeholder* dalam Kebijakan Publik

Adapun keterkaitan mengenai *stakeholder* dalam proses kebijakan publik merupakan sebuah bukti bahwa, pengambilan sebuah kebijakan ini tidak terlepas dari keterlibatan *stakeholder* yang ada di dalam sebuah kebijakan publik itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lattimore dkk (2010:52) yang menyatakan bahwa, *stakeholder* adalah merupakan mereka dan organisasi yang memiliki konsekuensi satu sama lain—mereka menciptakan masalah dan kesempatan satu sama lain.

Adapun pendapat menurut Budimanta dkk (dalam Saharuddin, 2013:233) yang mengungkapkan bahwa, *stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program.

Dari kedua pendapat ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *stakeholder* dalam kebijakan publik adalah merupakan individu ataupun kelompok yang memiliki sebuah kepentingan yang ada disebuah perusahaan atau di dalam program, dimana keterlibatan *stakeholder* tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan ataupun program.

B. Komunikasi Kebijakan Publik

Secara umum Edwards (dalam Winarno, 2016:156) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edwards, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Adapun 3 (tiga) indikator penting dalam mengukur keberhasilan komunikasi kebijakan yaitu:

1. Transmisi; faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.
2. Kejelasan: jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering kali instruksi-instruksi yang di teruskan kepada pelaksana-

pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

3. **Konsistensi;** jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Maka komunikasi dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai salah satu faktor penting dalam memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik.

C. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pada awalnya, pasar selalu menunjukkan tempat (fisik) bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang. Tetapi sekarang, setelah

ada alat-alat komunikasi yang sangat modern seperti telepon dan internet untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa tidak harus bertemu di suatu tempat (fisik). Karena orang dapat melakukan transaksi via telepon, *short message service* (SMS) dan internet. Jadi pengertian pasar sekarang adalah pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa (Halim, 2012:21). Dari hal tersebut, maka pengertian pasar pada zaman sekarang perkataan “tempat” perlu dihilangkan.

Adapun pendapat menurut Sumar'in (2013:155) yang menyatakan bahwa, secara umum pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Hal ini menjadikan pasar dapat terbentuk dimana saja dan kapan saja.

Menurut Pandjaitan (2015:6) yang menyatakan bahwa, pasar merupakan wahana pertemuan penjual dan pembeli untuk pertukaran. Sedangkan menurut Santosa (2013:78) menyatakan bahwa, pasar adalah tempat “syi'ar”, bersuara, atau berkumandang. Lazimnya tentu diutamakan apa isi pesan atau suaranya, meski tidak boleh pula mengabaikan siapa dan bagaimana menyampaikannya.

Dari berbagai pendapat teori diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasar merupakan tempat penjual dan pembeli yang saling berinteraksi dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di suatu area atau tidak bertemu secara langsung dalam proses transaksinya.

2. Ciri-ciri Pasar

Adapun ciri-ciri pasar saat ini menurut Halim (2012:22-23), dapat dilihat dari segi jenis dan bentuk pasar yang dalam hal ini untuk membedakan pasar-pasar yang

berkembang saat ini. Jika dilihat dari jenis nya pasar tersebut dibedakan menurut bentuk kegiatannya, cara transaksinya, menurut keleluasan distribusi dan luas jangkauannya, serta jenis pasar menurut jenisnya.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sumar'in (2013:156) yang membagi pasar ke dalam beberapa golongan yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan luas jangkauannya, berdasarkan hubungannya dengan proses produksi dan berdasarkan strukturnya. Dari uraian diatas, maka ciri-ciri pasar adalah memfasilitasi perdagangan dan alokasi sumber daya alam dalam masyarakat

3. Bentuk-bentuk Pasar

Dilihat dari bentuk–bentuk pasar dari segi output yang dihasilkan menurut Pandjaitan (2015:165) yaitu, meliputi: a) pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) dimana merupakan suatu pasar yang jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa; b) pasar persaingan monopolistik (*monopolistic competition market*) ialah salah satu bentuk pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek; c) pasar oligopoli jika jumlah produsen sedikit sedangkan konsumen banyak; d) pasar monopoli merupakan pasar dengan penjual tunggal dan satu produk; e) pasar monopsoni merupakan bentuk pasar faktor produksi di mana hanya ada satu pembeli tunggal produk di pasar tertentu; f) pasar duopoli merupakan suatu pasar yang dimana suatu barang dikuasai oleh 2 (dua) buah perusahaan, sedangkan; g) pasar oligopsoni adalah sebuah pasar dimana terdapat 2 (dua) atau lebih pelaku usaha yang menjadi

penguasa atau penerimaan pasokan dari pihak luar pasar, atau bisa dibidang sebagai pasar yang memiliki pembeli tunggal atas suatu produk baik barang maupun jasa dalam suatu pasar komoditas.

Dalam bentuk-bentuk pasar ini lebih menekankan pada sebuah bentuk-bentuk persaingan dalam pasar, baik konsumen kepada produsen ataupun konsumen dengan konsumen dan produsen dengan produsen. Segala bentuk pasar pada umumnya, lebih memperlihatkan bagaimana proses interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga dapat dilihat bahwasanya pasar merupakan sebuah pusat perekonomian masyarakat dalam lingkup mikro.

4. Pasar sebagai Pusat Perekonomian Masyarakat

Salah satu peranan penting adanya pasar adalah mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumar'in (2013:156) yang menyebutkan, peran hadirnya pasar adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya alam dalam masyarakat.

Hal tersebut dipertegas menurut Sumar'in (2013:156) yang membagi pasar ke dalam beberapa golongan yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan luas jangkauannya, berdasarkan hubungannya dengan proses produksi dan berdasarkan strukturnya.

Adapun bentuk pasar lainnya, seperti pasar yang dikemukakan oleh Halim (2011:23-29) yang menyebutkan bahwa, bentuk-bentuk pasar dibagi berdasarkan segi output yang dihasilkan yaitu meliputi: pasar persaingan sempurna (*perfect*

competition), pasar persaingan monopolistik (*monopolistic competition market*), pasar oligopoli, pasar monopoli, pasar duopoli, pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Bisa dikatakan segala bentuk pasar pada umumnya, lebih memperlihatkan bagaimana proses interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga dari hal tersebut membuktikan bahwa pasar memang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi di dalam masyarakat.

D. Program Revitalisasi Pasar Tradisional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi merupakan proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Sedangkan, Utomo (2011:21) menyebutkan bahwa, revitalisasi mengandung arti harfiah, yaitu menghidupkan kembali, maknanya bukan sekedar mengadakan atau mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, dan menyesuaikan dengan kondisi baru, semangatnya dan komitmennya.

Berdasarkan kedua pengertian revitalisasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa revitalisasi merupakan proses atau tindakan penghidupan kembali dari kondisi sebelumnya, dengan tujuan dapat menyempurnakan dari struktur, mekanisme kerja dengan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Menurut Masni (2014:12-13) yang menyatakan bahwa, pasar tradisional merupakan pasar yang bentuk bangunannya relatif sederhana, dengan suasana yang relatif kurang menyenangkan (ruang usaha sempit, sarana parkir kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar dan penerangan yang kurang baik). Adapun pasar tradisional memiliki ciri-ciri yaitu, 1) dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi-

fungsi manajemen: P (*planning*), O (*organizing*), A (*actuating*), C (*controlling*), 2) tidak ada konsep *marketing* yaitu: bahwa pembeli adalah raja, terdapat pelayanan penjualan, penentuan harga berdasarkan perhitungan harga pokok ditambah keuntungan tertentu, produk berkualitas, tempat penjualan yang nyaman bagi pembeli dan lain-lain.

Revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang diperuntukkan bagi pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka memperbaiki kondisi fisik pasar dan sistem pengelolaannya dengan tujuan dapat menyejahterahkan masyarakat serta dapat bersaing dengan pasar modern. Dipertegas dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pada Bab I Pasal 1, disebutkan yang dimaksud dengan revitalisasi yaitu, usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas sarana perdagangan.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengusung sebuah visi dan misi terhadap 3 (tiga) problem pokok bangsa yaitu salah satunya, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Dalam menghadapi problema mengenai hal tersebut, maka pemerintah membuat sebuah program prioritas yang disebut dengan Nawa Cita atau 9 (sembilan) agenda kebijakan yang salah satunya mengarah kepada peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dalam agenda kebijakan mengenai peningkatan perekonomian nasional tersebut, maka pemerintah mulai merealisasikan ke dalam program revitalisasi pasar tradisional.

Adapun dalam program revitalisasi pasar tradisioaal tersebut pemerintah akan membangun pasar tradisional sebanyak 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada. Kementerian Perdagangan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan program revitalisasi pasar sesuai dengan isi Janji Nawa Cita. Sumber: (Mendag: Target Revitalisasi Pasar 2015 Tercapai pada situs <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/mendag-target-revitalisasi-pasar-2015-tercapai> diakses pada Sabtu, 05 November 2016 pukul 10.05 WIB)

Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan atas dasar untuk memperlancar distribusi arus barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri, perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang dan pusat distribusi. Serta, untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang dan pusat distribusi. Maka, diperlukannya secara konkret pelaksanaan program pembangunan perekonomian melalui upaya pembangunan salah satunya dengan revitalisasi pasar tradisional.

Agar selaras dengan tujuan dari pemerintah pusat maka, *stakeholder* daerah yang terlibat dalam revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ini haruslah mengetahui pedoman program revitalisasi pasar tradisional yang telah tertuang dalam program pemerintahan pusat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, sebagaimana disebutkan pada Bab II Pasal 2 yaitu; Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman

bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan atau revitalisasi dan pengelolaan sarana perdagangan. Dengan begitu, *stakeholder* daerah Pringsewu dapat mengimplementasikan program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2013:8) penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan–kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan seperti tempat, fenomena, waktu serta pengaruh lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti telah menemukan, memahami dan menjelaskan tentang analisis keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016, serta menganalisisnya dengan rinci.

B. Fokus Penelitian

Moleong (2013:237) menyatakan, penentuan fokus penelitian memiliki dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penentuan fokus

secara efektif menetapkan kriteria inklusi–eksklusi atau kriteria masuk–keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Dalam hal ini, penelitian ini telah difokuskan pada teori komunikasi kebijakan menurut Edwards (dalam Winarno, 2016:156) yang mengategorikan 3 (tiga) indikator keberhasilan dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016
 - a. *Stakeholder* yang terlibat dan alasan keterlibatan *stakeholder*
 - b. Ranah keterlibatan *stakeholder*
 - c. Peranan *stakeholder* dalam menyukseskan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016
2. Komunikasi atau hubungan antar *stakeholder* yang terlibat dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016
 - a. Proses komunikasi antar *stakeholder* dalam melaksanakan program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016
 - b. Bentuk kordinasi antar *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

C. Lokasi Penelitian

Moleong (2013:128) menyatakan bahwa, cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Pasar

Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo III Kabupaten Pringsewu. Pemilihan lokasi yang dipilih oleh peneliti ini, berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Dari lokasi itu, peneliti mengumpulkan data-data yang relevan untuk penelitiannya mengenai keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *humans instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu, peneliti terjun langsung ke lapangan mengumpulkan data yang terkait dan mencari informan yang terkait menggunakan *notebook*, *tape recorder*, kamera digital, dan data-data instansi yang terkait program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengamatan suatu variabel yang bentuknya berupa angka, kata-kata atau citra. Adapun jenis data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Dengan

demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Data primer tersebut meliputi:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan/Instansi	Jabatan/Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1.	Nurdin	Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu	11 Januari 2017
2.	Nurhayati	Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Keamanan Kabupaten Pringsewu	11 Januari 2017
3.	Sagang Nainggolan	Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu	12 Januari 2017
4.	Tarno	Pedagang CD/DVD Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	13 Januari 2017
5.	Yuni	Pedagang pakaian anak-anak Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	13 Januari 2017
6.	Siti Sholehah	Pedagang pakaian wanita Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	14 Maret 2017
7.	Tomi	Pedagang aksesoris Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	14 Maret 2017
8.	Zainudin	Masyarakat Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	24 Maret 2017
9.	Karman	Masyarakat Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	24 Maret 2017

Sumber : *Diolah Peneliti (2017)*

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder ini, peneliti merujuk kepada, dokumen resmi, surat kabar, laporan kegiatan, foto–foto di lapangan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Tabel 2. Dokumen Penelitian

No.	Dokumen	Substansi
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Fungsi, kewenangan dan tugas DPRD
2.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta dalam pelaksanaan pembangunan atau revitalisasi dan pengelolaan sarana perdagangan
3.	Gambar Rencana Pekerjaan: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016	Teknis pembangunan sarana dan prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu di tiap-tiap kios
4.	Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Berisi tugas pokok yaitu melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2012	Peralihan dari Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Pringsewu yang sebelumnya adalah hasil pemekaran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pringsewu
5.	Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Masyarakat Pasar Sukoharjo, Kepala Diskoperindag dan Komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu meninjau teknis pembangunan Pasar Sukoharjo 2. Foto Teknis Rencana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016

Sumber: *Diolah Peneliti (2017)*

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data–data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada proses ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang berasal dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu (Diskoperindag), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu, DPRD Kabupaten Pringsewu, serta pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu serta cara *stakeholder* dalam mengomunikasikan program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016.

b. Dokumentasi

Sugiyono (2014:240) menyatakan bahwa sebuah hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Dokumentasi yang digunakan untuk mendukung penelitian mengenai analisis keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016 ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Gambar Rencana Pekerjaan: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016,

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2012, serta dokumentasi berupa foto.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) mengemukakan data bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intreraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

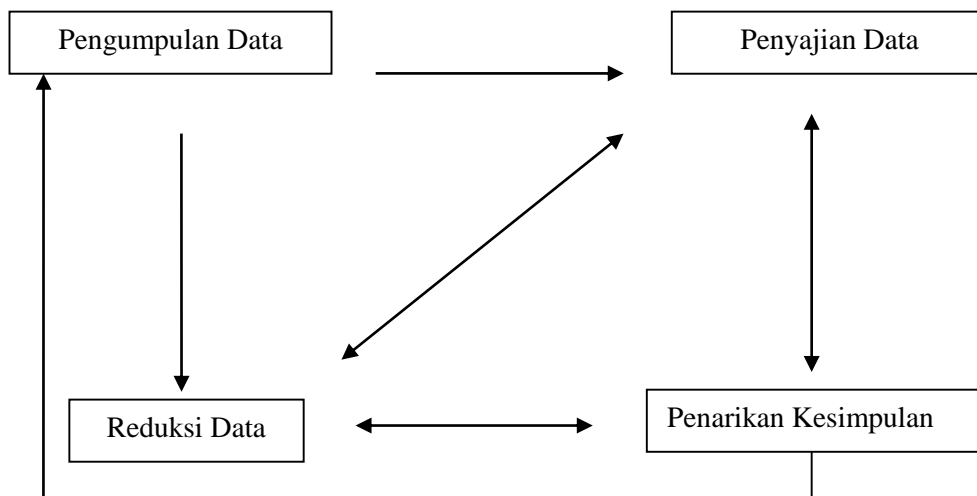
1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, peneliti telah memilah-milah data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan mana yang tidak dibutuhkan. Kemudian, peneliti telah memisahkan data yang benar-benar berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu

dari penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. Penyajian data telah dilakukan dengan mendeskripsikan atau merapikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami tentang revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.



Gambar 1. Analisis data Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246)

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan penarikan kesimpulan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai sebuah analisis keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

H. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2013:324), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Moleong, 2013:330) membedakan 4 (empat) macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Tabel 3. Contoh Tabel Triangulasi Analisis Keterlibatan *Stakeholder* dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016

Fokus Penelitian	Sumber Data				Kesimpulan
	Indikator	Wawancara	Dokumentasi	Observasi	
Keterlibatan Stakeholder dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dan alasan keterlibatan <i>stakeholder</i>	Dikonfirmasi oleh Sagang Nainggolan selaku Wakil Ketua DPRD Komisi II Kabupaten Pringsewu: “Dalam program revitalisasi pasar yang ada di Sukoharjo, kami DPRD Kabupaten Pringsewu hanya melakukan salah satu fungsi DPRD yaitu pengawasan. Terhadap program revitalisasi yang dilakukan oleh pihak Diskoperindag maka kami melakukan pengawasan terhadap pihak Diskoperindag perihal pelaksanaan program revitalisasi Pasar Sukoharjo” (hasil wawancara tanggal 12 Januari 2017)	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	-	Yang terlibat dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016 adalah: 1. DPRD Kabupaten Pringsewu 2. Diskoperindag Kabupaten Pringsewu 3. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu 4. Masyarakat Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu 5. Pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Sumber: *Diolah Peneliti (2017)*

2. Keteralihan Data (*Transferability*)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti telah melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan penelitian.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian Data (*Confirmability*)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Pemeriksaan telah dilakukan oleh pembimbing skripsi menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Pringsewu merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Tanggamus, serta salah satu dari 3 (tiga) kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yang diresmikan oleh H.Mardiyanto selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.

Dengan bertambahnya Kabupaten Pringsewu, maka Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Pringsewu yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta mempersiapkan pemindahan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

Sebagai salah satu daerah otonomi yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu memiliki luas wilayah 625 km², dengan penduduk berjumlah 377.857 jiwa yang terdiri dari 195.400 laki-laki dan 182.457 perempuan. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 96 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, dan Kecamatan Banyumas. Dari segi luas wilayah Kabupaten Pringsewu saat ini, dapat dikatakan sebagai kabupaten terkecil sekaligus daerah yang terpadat di Provinsi Lampung.

Guna melayani kebutuhan warga, di pusat kota Pringsewu sendiri terdapat 4 (empat) buah pasar tradisioanal yakni pusat perbelanjaan Pringsewu, Pasar Sarinongko, Pasar Baru Pringsewu, dan Pasar Pagi yang siap melayani masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Selain itu terdapat pasar kecamatan yang berada disetiap ibukota kecamatan serta pasar desa. (*sumber: Kabupaten Pringsewu http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_pringsewu diakses pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 11.07 WIB*)

Pasar Sukoharjo merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pringsewu. Pasar Sukoharjo bertempat di Jalan Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan memiliki jadwal pasaran setiap hari Senin dan Jumat.

Pasar Sukoharjo sebelumnya adalah lahan kosong yang dimiliki oleh para veteran Corps Tjagangan Nasional atau disingkat CTN. Melihat lahan kosong tersebut, akhirnya para veteran CTN memetakan lahan kosong tersebut menjadi 3 (tiga) lahan, yang terdiri dari lahan untuk lapangan, makam, dan pasar. Akhirnya, pada 3

lahan tersebut terbentuklah Desa Puteran yang dimana nama “puteran” tersebut diangkat dari “veteran”. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut dalam segi pengelolaannya yang terbatas akhirnya mengibahkan lahan pasar untuk di kelola oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Lahan yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu untuk Pasar Sukoharjo yaitu 800 m². Pada tahun 2015, omset pada Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Rp118.000.000/minggu, Rp473.600.000/bulan, serta Rp5.683.000.000/tahun. (Hasil wawancara dengan Nurdin, selaku Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu pada tanggal 11 Januari 2017)

Dalam proses pembangunan Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu telah dilakukan 2 kali revitalisasi yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2016. Adapun tahapan revitalisasi los pasar pada tahun 2014 sebanyak 60 unit dan dilanjutkan kembali revitalisasi los pasar pada tahun 2016 sebanyak 33 unit. Dalam hal ini revitalisasi yang dilakukan di Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah pihak swasta yang melakukan pembongkaran dan pembangunan los-los pasar.



Gambar 2. Los Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang direvitalisasi tahun 2014

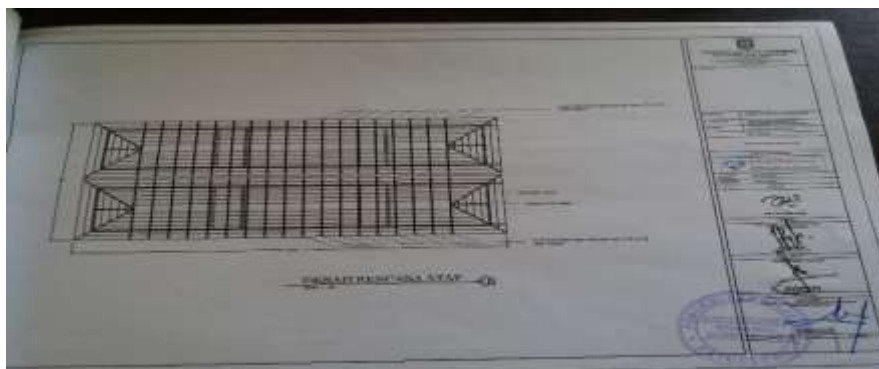
Sumber: *Dokumentasi Peneliti (2017)*



Gambar 3. Los Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang direvitalisasi tahun 2016

Sumber: *Dokumentasi Peneliti (2017)*

Pihak swasta yang melakukan pembongkaran dan pembangunan los-los pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah CV Super Power Engineering. Pihak swasta dalam hal ini berkoordinasi kepada pihak Diskoperindag Kabupaten Pringsewu mengenai pelaksanaan pembongkaran dan pembangunan los-los Pasar Sukoharjo. Bentuk kerjasama antara pihak Diskoperindag dan CV Super Power Engineering dibuktikan dengan penandatanganan di dokumen Gambar Rencana Pekerjaan: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016.



Gambar 4. Bentuk Kerjasama antara Diskoperindag Kabupaten Pringsewu dengan CV Super Power Engineering

Sumber: *Dokumentasi Dokumen Gambaran Rencana Kerja Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Diskoperindag Tahun 2016*

Berikut ini merupakan klasifikasi pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Berdasarkan Klasifikasinya

No.	Jenis Berdagang	Ukuran	Sewa	Jumlah
1.	Toko	3x4 m	Rp4000/hari	27 unit
2.	Los	2,5x2,5 m	Rp3000/hari	40 unit
		2x2 m		158 unit
3.	Hampanan	-	Rp3000/hari	180 unit
Jumlah				405 unit

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

Dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016, dilaksanakannya sebanyak 33 los pasar yang direvitalisasi. Dalam penyampaian mengenai revitalisasi los pasar tersebut kepada masyarakat, dilakukan di Balai Pekon Sukoharjo 3 Kabupaten Pringsewu. Isi dari penyampaian terkait revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, yaitu mengenai teknis pelaksanaan dan penetapan tanggal pelaksanaan revitalisasi kepada Pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai analisis keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016. Berdasarkan hasil serta pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan mengenai keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

1. *Stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah
 - a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu.
 - b. Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.
 - c. DPRD Kabupaten Pringsewu.
 - d. Masyarakat Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
 - e. Pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
2. Ranah keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yaitu

- a. Diskoperindag Kabupaten Pringsewu melakukan sosialisasi program dan melaksanakan pembongkaran dan pembangunan kembali los Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- b. Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu melakukan sosialisasi program, menjaga dan merawat pasar yang sudah selesai direvitalisasi, menetapkan harga sewa los-los pasar, memberikan hak guna pakai serta penarikan retribusi atas sewa los-los pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- c. DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan kepada Diskoperindag dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terhadap pelaksanaan program revitalisasi serta menerima keluhan masyarakat dan pedagang pasar mengenai program revitalisasi pasar yang dirasa merugikan.
- d. Masyarakat Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dihimbau untuk menciptakan suasana kondusif saat revitalisasi berlangsung serta menjaga sarana dan prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- e. Pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dihimbau untuk mengikuti sosialisasi program, mengosongkan los pasar yang akan dibangun, menempati tempat relokasi yang telah disediakan Pemerintah Daerah selama proses revitalisasi berlangsung serta membayar sewa dan retribusi tepat waktu.

3. Peranan *Stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah

- a. Diskoperindag Kabupaten Pringsewu selaku eksekutor dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo.
 - b. Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu selaku partner Diskoperindag Kabupaten Pringsewu dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo.
 - c. DPRD Kabupaten Pringsewu selaku Fasilitator bagi masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo dalam pelaksanaan program revitalisasi Pasar Sukoharjo.
 - d. Masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo yang merupakan sasaran dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
4. Proses komunikasi antar *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yaitu
- a. Diskoperindag dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat Pasar Sukoharjo mengenai proses revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan diawasi oleh DPRD Kabupaten Pringsewu untuk memastikan bahwa tersampaikan ke masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo.
 - b. DPRD Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada masyarakat dan pedagang untuk mengikuti arahan dari pihak Diskoperindag dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu terkait pelaksanaan revitalisasi di Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
5. Koordinasi antar *stakeholder* dalam program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016 yaitu

- a. Diskoperindag Kabupaten Pringsewu dan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu menghimbau masyarakat dan meminta pedagang menempati tempat relokasi yang telah disediakan. Namun, masyarakat dan pedagang menilai tempat yang disediakan kurang sesuai dan tidak nyaman.
- b. Masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu meminta untuk penundaan pembongkaran dan menilai sosialisasi pembongkaran yang diadakan kurang tepat waktunya serta menilai tempat relokasi yang kurang sesuai. Tetapi, dari pihak Diskoperindag Kabupaten Pringsewu tidak mengakomodir keinginan masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo.
- c. DPRD Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo agar mau menerima pembongkaran yang telah ditetapkan oleh Diskoperindag Kabupaten Pringsewu. Kemudian, DPRD Kabupaten Pringsewu juga menghimbau kepada Diskoperindag Kabupaten Pringsewu dan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu harus tetap memerhatikan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat dan pedagang selama proses pembongkaran los pasar berlangsung.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Diskoperindag Kabupaten Pringsewu dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu bisa lebih interaktif kepada masyarakat dan pedagang Pasar

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu mengenai pelaksanaan program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

2. Diskoperindag Kabupaten Pringsewu dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu harus bisa memperhitungkan waktu yang efektif ketika akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu mengenai pelaksanaan program revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2016.
3. Diskoperindag Kabupaten Pringsewu perlu berkoordinasi yang lebih intensif dengan pihak DPRD Kabupaten Pringsewu terkait keluhan para pedagang pasar agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: kajian konsep teori dalam upaya menciptakan Good Governance*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Gambar Rencana Pekerjaan: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016.
- Gambaran Umum Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.
- Halim, Muh.Abdul. 2012. *Teori Ekonomika*. Tangerang : Jelajah Nusa.
- Lattimore, Dan dkk. 2010. *Public Relations: Profesi dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Masni, Yeni. 2014. *Analisis Preferensi Konsumen dalam Berbelanja di Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Makassar. Hlm.12-13.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, Kholifatul. 2016. *Koordinasi Multistakeholder dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur (studi tentang Koordinasi Multistakeholder di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm.32-33.
- Pandjaitan, Sahala. 2015. *Teori Ekonomi Mikro Lanjut*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Posumah, Ferdy, 2015, '*Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara*', vol.15, no.02, hal.04, diakses pada Selasa, 01 November 2016 pukul 16.15 WIB <http://ejournal.unsrat.ac.id/>

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016.

Rosyidi, Suherman. 2001. *Pengantar Teori Ekonomi (pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Saharuddin dan Siska Oktavia, 2013, '*Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*, vol. 01, no. 03, hal. 233, diakses pada Kamis, 29 September 2016 pukul 16.15 WIB <http://journal.ipb.ac.id/>

Santosa, Awan. 2013. *Perekonomian Indonesia: masalah, potensi dan alternatif solusi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sekilas DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012.

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (konsep dan perkembangan ilmu di Indonesia)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2015. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Sulistio, Eko Budi. 2009. *Buku Ajar Kebijakan Publik (Public Policy)*.

Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam : sebuah pendekatan ekonomi mikro perspektif Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Syafie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung dan Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widodo, Tri, 2013, '*Studi tentang Peran Unit Pasar dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda*', vol.01, no.01, hal. 30-31, diakses pada Selasa, 01 November 2016 pukul 16.00 WIB. <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/>

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: teori, proses, dan studi komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Utomo, Hendra Widi. 2011. *Analisis Dampak Revitalisasi dan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjasari ke Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm.20-21.

Sumber lainnya:

Kabupaten Pringsewu pada situs http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_pringsewu pada Kamis, 09 Maret 2017 pukul 11.07 WIB

KBBI Daring – revitalisasi <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Revitalisasi> pada Rabu, 11 April 2017 pukul 14.05 WIB

Mendag: Target Revitalisasi Pasar 2015 Tercapai pada situs <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/mendag-target-revitalisasi-pasar-2015-tercapai/> pada Sabtu, 05 November 2016 pukul 10.05 WIB

“Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi JK pada situs <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/07544454/Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK/> pada Selasa, 01 November 2016 pukul 15.25 WIB

Sejarah singkat Kabupaten Pringsewu, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu <http://diskoperindagpsw.blogspot.co.id/2016/09/berdasarkan-undang-undang-nomor-48.html?m=1> diakses pada Jum'at, 27 Januari 2017 pukul 13.45 WIB